

Analisis *Flypaper Effect* pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat

Rahmat Nur Rafi^{1*}, Fefri Indra Arza²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: rahmatnurrafi1@gmail.com

Tanggal Masuk:

15 Agustus 2022

Tanggal Revisi:

19 Desember 2022

Tanggal Diterima:

25 Desember 2022

Keywords: *Local*

Government Revenue;

General Allocation Funds;

Special Allocation Funds;

Budget Financing Surplus;

Regional Expenditures.

How to cite (APA 6th style)

Rafi, N. R. & Arza, F. I. (2023). Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (1), 411-427.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.649>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Keberhasilan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah memberikan dampak positif untuk perekonomian daerah. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan proses otonomi daerah, dengan cara memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah. Dengan pengotimalan sumber pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat menganggarkan anggaran belanja daerah secara maksimal untuk kepentingan pelayanan publik. Kebijakan tentang otonomi daerah ini merupakan sebuah tantangan bagi

pemerintah daerah. Kemandirian daerah dapat dilihat dari bagaimana jumlah sumber pendapatan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Pemerintah daerah sampai saat ini mayoritas secara konsisten masih mengandalkan dana suntikan dari pemerintah pusat. Suntikan dana dari pemerintah pusat disebut juga dengan dana perimbangan atau dana transfer yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum adalah pendapatan daerah yang berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana APBN dialokasikan kepada kabupaten-kabupaten yang ditetapkan untuk pemerataan batas moneter antar daerah yang kemudian digunakan untuk mensubsidi kebutuhan provinsi dalam pelaksanaan desentralisasi (Sidik et al., 2002).

Dana transfer disini memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, dan memaksimalkan tercapainya standar pelayanan publik (Sidik et al., 2002). Kebutuhan akan pelayanan publik tentu disetiap daerah itu berbeda-beda. Pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap public akan melakukan pengeluaran (belanja daerah). Permasalahan saat ini, pemerintah daerah terlanjur membutuhkan DAU untuk membiayai pembangunan dan belanja modal tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Kuncoro, (2004) menyatakan bahwa PAD siap untuk mendukung penggunaan pengeluaran pemerintah lingkungan dari segala sesuatu yang dianggap 20%. Kenyataan ini telah mendorong perilaku asimetris pada pemerintah daerah. Kesenjangan fiskal dalam di Indonesia pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan pada suatu daerah yang terdesentralisasi memiliki kewajiban sangat tinggi namun hal tersebut tak disertai dengan kapasitas fiskal yang cukup. Desentralisasi fiskal membuat pemerintahan daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, hal ini karena dana yang dicurahkan oleh pemerintah pusat lebih besar daripada PAD. Sementara itu, transfer dari pemerintah pusat bertujuan untuk menyemearatakan kemampuan keuangan setiap daerah sehingga terjadi ketimpangan antara pendapatan dana transfer lebih besar dari pada pendapatan asli daerah mereka sendiri yang disebut sebagai fenomena *flypaper effect*.

Flypaper impact adalah kondisi yang terjadi ketika negara-negara di sekitar bereaksi terhadap pengeluaran lebih banyak dengan memanfaatkan aset penyesuaian untuk tujuan penggunaan lokal daripada menggunakan PAD (Pendapatan Asli Daerah) (Listiorini, 2012). Keunikan dampak *flypaper* pada umumnya dicirikan sebagai suatu kondisi dimana pembiayaan konsumsi provinsi lebih tinggi menggunakan atau menggunakan cadangan bergerak dibandingkan dengan memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (Yulina et al., 2017). Dampak *flypaper* terjadi karena dua kondisi, khususnya ketika hasil eksperimen menggambarkan nilai koefisien DAU yang tinggi bila dilihat dari nilai koefisien PAD dan kedua koefisien tersebut besar (1), nilai koefisien PAD kecil (Maimunah, 2006) (2).

Tabel 1
Rasio Tingkat Kemandirian Daerah

Kab/Kota	PAD	DAU	% PAD Terhadap DAU
Tanah Datar	115.914.187.915	695.555.745.000	16 %
Kota Solok	40.742.809.270	398.106.262.000	10 %
Kota Payakumbuh	103.244.423.500	437.696.934.000	23 %
Bukit Tinggi	101.936.792.227	450.905.882.000	22 %
Sijunjung	79.055.940.215	548.573.107.000	14 %

Sumber : APBD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2019

Menurut informasi di atas, pertukaran aset dari pemerintah pusat menyebabkan kecenderungan pemerintah negara bagian terdekat untuk meningkatkan Belanja pemerintah Daerah jadi tinggi namun tak diimbangi dengan peningkatan PAD. Tabel tersebut merupakan informasi APBD Provinsi Sumbar tahun 2018, cenderung terlihat bahwa ukuran cadangan PAD dibandingkan dengan DAU masih kecil, yaitu dari 10% menjadi 23%. Keterangan di atas menunjukkan bahwa sejak pelaksanaan kemerdekaan provinsi. Negara-negara tetangga sebenarnya bergantung pada pemerintah pusat. Ini memunculkan masalah tentang apa yang menyebabkan dampak flypaper sehingga legislatif di sekitarnya tidak memiliki pilihan untuk membelanjakan uang dengan meningkatkan pendapatan lingkungan.

Selain keterbatasan finansial, dampak flypaper juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan ketika ada perubahan moneter. Saat DAU dibangun, pemerintah daerah sekitar mengeluarkan uang tambahan, namun ketika jumlah DAU berkurang, belanja daerah tidak berkurang (Junaidi, 2012). Perilaku DPRD dalam menyikapi langkah-langkah dari pemerintah pusat merupakan isu sentral dalam mendukung kecukupan langkah. Pertukaran pekerjaan utamanya yang kontras dengan pendapatan lingkungan dalam membiayai pengeluaran pemerintah terdekat tidak benar-benar memberikan panduan yang layak bagi otoritas publik. Bukti observasional menunjukkan bahwa ketergantungan yang tinggi pada pergerakan diidentifikasi secara negatif dengan hasil administrasi (Yulina et al., 2017). Dalam pelaksanaan desentralisasi, tugas bergerak dapat dicoba untuk tidak mempertimbangkan bahwa kemerdekaan yang ditentukan mengharuskan daerah memiliki pilihan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang disetujui di kabupaten. Hal ini jelas menimbulkan lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam menyelesaikan urusan pemerintah daerah dibandingkan sebelum kemerdekaan.

Meskipun demikian, sedikit demi sedikit perpindahan dari pemerintah pusat merupakan aset utama bagi negara-negara di sekitarnya untuk mendukung tugas pokok sehari-harinya, yang mana Pemerintah Daerah mendanai kegiatan pokok sehari-harinya, yang dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah dalam perkiraan APBD. Ini bisa jadi karena perbedaan DAU menurut lokal. Saragih (2003) menjelaskan bahwa batasan yang berbeda adalah (a) DAU adalah (Mianto, 2007) penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan di samping tidak, (b) DAU tidak boleh diwakili mengingat fakta bahwa DAU adalah akibat kewajiban pemerintah kepada kabupaten, (c) DAU harus diberikan, baik kepada jaringan RT maupun menengah, mengingat DAU berasal dari cadangan APBN.

Prakoso (2007) dan Maimunah (2006) memimpin penelitian di daerah/perkotaan Jawa Timur, DIY dan di Pulau Sumatera tentang Flypaper Effect terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dalam model harapan untuk Belanja Daerah, kekuatan dana Alokasi Umum (DAU) pada Belanja Daerah yang ada saat ini masih lebih tinggi daripada kekuatan yang diharapkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Apalagi menurut Sukartono (Mianto dan Priyadi, 2019) dalam eksplorasinya menunjukkan PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah secara esensial, sedangkan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami Flypaper Effect, reaksi terhadap Belanja Daerah masih lebih diperhatikan karena adanya Dana Perimbangan, terutama yang berasal dari bagian Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, penelitian (Yulina et al., 2017) menunjukkan adanya pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan hal ini disebabkan karena dampak flypaper yang terjadi di lokal. dimana peruntukannya masih dibiayai dari Dana Perimbangan dari pemerintah pusat.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap adakah faktor dasar pada fenomena *flypaper effect* pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat karena banyaknya daerah yang semakin bergantung pada dana transfer daripada Pendapatan Asli Daerahnya sehingga terjadi *flypaper effect* sehingga menyebabkan stigma negatif pemerintah daerah, sehingga harus dikaji ulang secara komprehensif agar pemerintah daerah bisa memperbaiki kedepannya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam objek penelitian dan jenis variabel yang digunakan. Objek penelitian mencakup Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan menggunakan analisis data panel untuk periode tiga tahun, tahun 2016 sampai dengan 2020.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Agensi (Agency Theory)

Jensen, M.C Meckling (1976) menjelaskan hipotesis kantor adalah hipotesis yang menjelaskan bagaimana hubungan antara setidaknya dua orang, pertemuan atau asosiasi. Salah satu perkumpulan (kepala) membuat kesepakatan kontrak kerja yang disetujui dan diperhatikan dengan pihak lain (spesialis) dengan harapan spesialis akan menyelesaikan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh kepala. Ini adalah ide yang menjelaskan hubungan yang mengikat secara hukum antara kepala dan spesialis.

Masalah perkantoran merupakan kekhasan yang sering dijumpai dalam pergaulan baik di ruang privat maupun publik. Dari masalah organisasi, hipotesis ini terlihat untuk memperjelas masalah kantor yang terjadi antara pihak-pihak yang bekerja sama, namun memiliki berbagai tujuan dan pembagian kerja. Seperti yang ditunjukkan oleh (Jensen, M.C Meckling, 1976) hipotesis kantor menjelaskan dasar dari beberapa pemikiran kontrol hierarkis yang bergantung pada keyakinan bahwa administrasi pemilik membuat asumsi pemilik diabaikan.

Masalah hubungan kantor akan membawa ketidakrataan data dan keadaan yang tidak dapat didamaikan (Jensen, M.C Meckling, 1976). Pemanfaatan kemandirian daerah pada awalnya membuka celah dalam penggunaan hipotesis organisasi dalam penelitian perencanaan siang hari bolong yang merupakan gambaran penggunaan hubungan peruntukan antara pemerintah pusat dan legislatif di sekitarnya (Mardiasmo, 2012). Pemerintah pusat memberikan kekuasaan kepada negara-negara tetangga untuk menangani rekening mereka di dalam struktur terdesentralisasi yang sepenuhnya ditunjuk oleh badan legislatif terdekat. Meskipun demikian, penatausahaan dan peruntukan harta kekayaan yang diperlukan tidak dapat dilakukan oleh badan publik saja, sehingga badan publik tersebut memberikan kuasa kepada berbagai perkumpulan untuk mengurus harta kekayaan tersebut, hal ini dikarenakan badan publik tersebut tidak memiliki aset yang memadai untuk pendistribusian aset tersebut. Karena aset yang dibatasi ini, perencanaan diperlukan sebagai sistem yang signifikan untuk membaginya. Adanya berbagai tujuan di antara direksi dan spesialis seringkali membuat permasalahan jabatan (Mardiasmo, 2012).

Keterkaitan antara hipotesis jabatan dalam tinjauan ini dilihat dari hubungan pemerintah pusat dengan badan legislative dan selanjutnya hubungan antara perantara daerah oleh DPRD (kepala) dan pemerintah lingkungan (ahli) (Ardiansyah dkk, 2014). DPRD untuk mengarahkan pelaksanaan pemerintahan di lingkungan pemerintahan (ketua) agar segala pengaturan yang dilakukan oleh badan publik dapat menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat akan memberikan aset bergerak untuk menyesuaikan cadangan yang menyediakan akomodasi penuh untuk negara-negara tetangga bertekad untuk membantu legislatif di dekatnya, baik dalam membiayai kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah setempat, administrasi keuangan ini juga harus dilakukan untuk membantu individu dalam menawarkan

jenis bantuan terbuka yang lebih baik ke daerah, karena uang memiliki tempat dengan individu. Dengan demikian pemanfaatannya harus benar-benar ditujukan pada daerah-daerah yang fokus pada kepentingan umum yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah juga.

Hipotesis kantor menjelaskan bahwa pertemuan yang terkait dengan sistem perencanaan cenderung memperluas utilitas mereka melalui distribusi aset dalam rencana pengeluaran. Pimpinan sebagai pengusul rencana keuangan dan sekaligus sebagai pelaksana rencana pengeluaran berusaha memperluas ukuran rencana pengeluaran, sedangkan badan pengatur yang dipilih oleh individu menggunakan rencana keuangan sebagai alat pemeriksa. Badan pembuat undang-undang dapat mengubah ukuran rencana keuangan dan mengubah penyebaran pengeluaran/penggunaan. Dampak flypaper yang terjadi dalam penyusunan APBD dapat dilenyapkan dengan perilaku ketua dan majelis dalam mendukung pengesahan rencana keuangan.

Belanja Daerah

PSAP No.2 Mengatakan bahwa Seluruh pengeluaran dari rekening kas Negara itu akan mengurangi saldo anggaran per periode. Sedangkan menurut PEMENDAGRI No.21 tahun 2011 belanja daerah didefinisikan dengan pengurangan nilai kekayaan bersih pada suatu daerah. PP No.71 Tahun 2010 mengatakan bahwa pelaporan keuangan dikelompokkan diantaranya: belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain/belanja tak terduga, belanja transfer.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004. Sesuai UU no. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kewajiban yang dibebankan kepada daerah yang terutang oleh orang atau benda yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak segera disamaratakan dan dimanfaatkan untuk keperluan provinsi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah aset yang berasal dari alokasi APBN yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk belanja kebutuhan provinsi agar dapat melaksanakan Desentralisasi. pembagian aset ke daerah melalui pembagian pendapatan asli daerah dengan antar daerah lainnya dengan mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan daerah.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah pendapatan yang berasal dari alokasi APBN kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan kepentingan nasional di bidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan, perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan, Halim (2002).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Menurut Permendagri No. 13/2006, sisa Pembiayaan Anggaran Lebih (SiLPA) adalah selisih antara anggaran pendapatan dan belanja untuk suatu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran terakhir meliputi kelebihan penerimaan PAD, wilayah hukum, simpanan, tunggakan kewajiban

kepada pihak ketiga hingga akhir tahun, dan pendanaan untuk kegiatan yang sedang berjalan. Pasal 37 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa apabila realisasi penerimaan lebih kecil dari realisasi belanja, maka sisa pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran, atas beban belanja langsung sebagai kegiatan lanjutan untuk membiayai pelaksanaan dan membiayai kewajiban. Serta kegiatan lain yang belum selesai pada akhir tahun buku.

Flypaper Effect

Flypaper Effect merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah menggunakan belanja lebih banyak menggunakan anggaran dana transfer yang diprosikan sebagai DAU, dari pada menggunakan PAD nya sendiri. Ketika koefisien DAU pengaruhnya signifikan terhadap belanja daripada PAD maka, kondisi ini disebut sebagai *flypaper effect*.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri. Penerimaan daerah tersebut berasal dari kesadaran masyarakat akan pentingnya kekayaan daerah. Masyarakat disini berperan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya, dimana dengan masyarakat membayarkan pajak kepada pemerintah daerah maka itu merupakan sumber dari pendapatan daerah. Melakukan belanja daerah tentu membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur yang ada pada daerah, salah satunya disini bisa menggunakan PAD pada pemerintah daerah untuk melakukan belanja daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah yaitu, dalam melakukan belanj daerah tentu membutuhkan anggaran, salah satu sumber anggaran untuk membangun infrastruktur yang ada di daerah yaitu dari pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kotadi Provinsi Sumatera Barat.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan daerah. DAU merupakan bagian kecil dari total APBD. Dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila DAU tinggi maka akan memberikan peluang yang besar untuk memenuhi belanja daerah, karena DAU termasuk sumbangan yang diberikan oleh pemerinth pusat kepada pemerintah daerah yang digunakn untuk memenuhi kebutuhan daerah yang ini merupakan bagian dari belanja daerah.

DAU pada daerah ditentukan dari besar atau kecilnya celah fiscal pada suatu daerah yang hal tersebut merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah, makanya disini kita bisa memanfaatkan DAU sebagai salah satu tolak ukur dalam memenuhi kebutuhan daerah yang bisa digunakan sebagai belanja daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kotadi Provinsi Sumatera.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan daerah. DAK merupakan bagian kecil dari total APBD. DAK dialokasi untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam membiayai kebutuhan kebutuha khusus seperti pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi serta sarana dan prasarana.

Hubungannya dengan belanja daerah disini adalah dalam melakukan belanja daerah tentunya membutuhkan anggaran, anggaran tersebut bisa dari DAK yang anggaran tersebut juga diperuntukkan untuk belanja khusus pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kotadi Provinsi Sumatera Barat.

Pengaruh SILPA terhadap Belanja Daerah

Pemerintah dapat menggunakan kelebihan dana yang tersisa dalam anggaran untuk belanja daerah di bidang infrastruktur. Penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswantoro (2012), Mentayani & Rusmanto (2013), Arifah & Haryanto (2019), Rahayu (2019), Abdullah & Rona (2014), Fahlevi (2017), Mutiah & Mappanyuki (2016) menemukan bahwa SiLPA Dampak terhadap belanja daerah. SiLPA berarti masih memiliki peran dalam pembiayaan belanja pemerintah daerah. Karena SILPA tahun lalu bisa digunakan untuk menutupi defisit tahun berjalan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan asumsi sebagai berikut:

H4: Sisa penerimaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota Sumatera Barat.

Analisis fenomena *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah

Menurut (Iskandar, 2012) *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (unconditional grants) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (Iskandar, 2012 dalam (A Solikin, 2016). Menurut Nahlia (2014) menganggap sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga harusdibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan PAD. Fenomena tersebut membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.

Fenomena *flypaper effect* dianggap dapat meningkatkan Belanja Daerah, hal ini karena tingkat sumber pendanaan daerah meningkat karena adanya dana transfer dari pemerintah pusat (V et al., 2012). Dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dan sumber daya daerah tidak dilakukan secara optimal, sehingga bisa dikatakan Pemerintah Daerah tidak mandiri dalam mengelola keuangan yang bersumber dari PAD untuk mendanai kebutuhan belanja di daerah sendiri.

H5: Terjadi atau tidaknya fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel. Objek yang diteliti adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Sisa Lebih Penerimaan Anggaran (SiLPA, dan Belanja Daerah (BD) pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2020.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang berjumlah 19 Kabupaten/Kota. Adapun Kabupaten/Kota yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat yaitu 12 kabupaten dan 7 kota yang terdiri dari Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto dan Kota Solok. Dalam penelitian ini sampelnya adalah seluruh populasi tersebut, bisa juga disebut dengan sampel jenuh dengan metode sensus.

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi, sumber dari penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang dipublikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, serta dengan mempelajari dan memahami berbagai sumber melalui buku-buku, jurnal penelitian, literatur, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai data PAD, DAU, DAK, dan SiLPA pada pemerintahan Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat tahun 2016 sampai 2020 dimana data yang digunakan adalah Laporan realisasi APBD yang telah dipublikasi oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Pengukuran Variabel Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut UU No.33 Tahun 2004 merupakan segala bentuk pembebanan daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan netto dalam suatu periode tahun anggaran. Pengukuran Belanja Daerah dapat dilihat dari total Belanja untuk masing masing kabupaten/kota yang bersumber dari data Laporan Realisasi Anggaran dalam posbelanja seperti berikut :

$$\text{Belanja Daerah} = \text{Belanja Operasi} + \text{Belanja Modal} + \text{Belanja Tak Terduga}$$

Sumber: *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010*

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan keunagan pemerintah yang bersumber dari pemerintah itu sendiri. Ini diukur dengan skala rasio. PAD dapat diukur dengan perhitungan :

$$\text{PAD} = \text{Total pajak daerah} + \text{total retribusi daerah} + \text{total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain pendapatan daerah yang sah.}$$

Sumber : *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010*

Dana Alokasi Umum

DAU adalah danayang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dalam penelitian ini adalah angka realisasi

DAU dari Pemerintah Kabupaten/Kotadi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2016 hingga 2020 dengan menggunakan nominal mata uang Indonesia yaitu Rupiah (Rp).

Dana Alokasi Khusus

Kekayaan Daerah adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang mana sumber daya tersebut akan digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. DAK merupakan aset yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan sesuai dengan kepentingan nasional. DAK untuk masing-masing pemerintah provinsi dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD (Ardhani 2011).

SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan, yaitu selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto. Rumus perhitungan SILPA adalah sebagai berikut :

$$\text{SILPA} = \text{Surplus//Defisit} + \text{Pembiayaan Netto}$$

Sumber : Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010

Flypaper Effect

Flypaper Effect adalah kondisi dimana pemerintah menggunakan belanja lebih banyak menggunakan anggaran dana transfer dari pada menggunakan PAD nya sendiri. Ketika koefisien DAU pengaruhnya signifikan terhadap belanja daerah daripada PAD maka, situasi ini disebut sebagai *flypaper effect*. Atau dapat difungsikan jika $b_1 > b_2$ berarti $b_1/b_2 > 1$ maka terjadi *flypaper effect* dan sebaliknya (Afrizawati, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std deviation	
	Statistic	statistic	statistic	statistic	Std error	
Belanja daerah	84	5.1E+10	1.5E+14	5.387E+13	5.1317E+12	4.7033E+13
PAD	84	5.1E+10	1.8E+13	7.795E+12	4.3956E+11	4.0286E+12
DAU	84	501682277.0	7.10963E+14	8.99683E+12	8.45745E+12	7.75138E+13
DAK	84	149425407.0	2.4E+13	4.472E+11	2.8783+11	2.6380E+12
SILPA	84	1.6E+10	1.5E+13	5.097E+12	4.4668E+11	4.0939E+12
Valid N (listwise)	84					

Sumber: Data Olahan SPSS 26, Tahun 2022

Hasil uji statistik deskriptif terhadap Belanja Daerah menunjukkan nilai minimum 5.1E+10 dan nilai maksimum 1.5E+14 dengan nilai rata-rata 5.387E+13 dan standar deviasi 4.7033E+13. Variable independen pertama yaitu PAD dengan nilai minimum 5.1E+10 dan nilai maksimum 1.8E+13 dengan nilai rata-rata 7.795E+12 dan standar deviasi 4.0286E+12. Variable independen ke dua yaitu DAU dengan nilai minimum 501682277.0 dan nilai maksimum 7.10963+14 dengan nilai rata-rata 8.99683E+12 dan standar deviasi 7.75138E+13.

Variable independen ketiga yaitu DAK dengan nilai minimum 149425407.0 dan nilai maksimum 2.4E+13 dengan nilai rata-rata 8.99683E+12 dan standar deviasi 2.6380e+12. Variable independen keempat yaitu SILPA dengan nilai minimum 1.6E+10 dan nilai maksimum 1.5E+13 dengan nilai rata-rata 5.097e+12 dan standar deviasi 4.0939E+12.

Uji Hipotesis

Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu model regresinya sudah lulus uji asumsi klasik.

Tabel 3
Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2.532E+11	3.560E+10		7.113	.000
PAD	.898	.326	.124	2.752	.008
DAU	.185	.071	.117	2.219	.030
DAK	2.566	.183	.817	14.011	.000
SILPA	.677	.285	.100	2.380	.020

a. Dependent Variable : Belanja Daerah
Sumber: Data Olahan SPSS 26, Tahun 2022

$$Y = 2.532E + 11 + 0.898X_1 + 0.158X_2 + 2.566X_3 + 0.677X_4 + e$$

Nilai konstanta bernilai positif sebesar $2.532E + 11$, hal ini memiliki makna bahwa variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan sisa lebih pembiayaan anggaran dianggap konstan (0), maka belanja daerah pada Kabupaten/ Kota di provinsi Sumatera Barat adalah sebesar $2.532E + 11$ satuan. Koefesien regresi variabel pendapatan asli daerah (b1) bernilai positif sebesar 0.898 . Hasil ini memiliki makna bahwa setiap kenaikan pendapatan asli daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat sebesar 1 satuan, akan menaikkan belanja daerah sebesar 0.898 satuan. Koefesien regresi variabel dana alokasi umum(b2) bernilai positif sebesar 0.158 . Hasil ini memiliki makna bahwa setiap kenaikan dana alokasi umum di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat sebesar 1 satuan, akan menaikkan belanja daerah sebesar 0.158 satuan. Koefesien regresi variabel dana alokasi khusus (b3) bernilai positif sebesar 2.566 . Hasil ini memiliki makna bahwa setiap kenaikan dana alokasi khusus di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat sebesar 1 satuan, akan menaikkan belanja daerah sebesar 2.566 satuan. Koefesien regresi variabel sisa lebih pembiayaan anggaran (b4) bernilai positif sebesar 0.677 Hasil ini memiliki makna bahwa setiap kenaikan sisa lebih pembiayaan anggaran di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat sebesar 1 satuan, akan menaikkan belanja daerah sebesar 0.677 satuan. $Error = 3.560E+10$ (*error*) yang ada dalam persamaan regresi diatas membuktikan adanya resiko kesalahan, yang berarti sedikit atau banyak keputusan dalam penerimaan atau penolakan hipotesis terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan.

Uji Simultan (Uji statistik F)

Tabel 4
Uji F

Model		Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3.632+24	4	9.079E+23	154.742	.000 ^b
	Residual	3.990+23	68	5.867E+21		
	Total	4.031E+24	72			

- a. Dependent Variable: Belanja Daerah
 b. Predicators: (Constant), SILPA, DAU, PAD, DAK
 Sumber: Data Olahan SPSS 26, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4 diketahui nilai Fhitung untuk pengaruh x1 sampai x4 secara simultan terhadap BD senilai 154.742 dan nilai Ftabel sebesar 2.49. Hal ini berarti x1 sampai x4 berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap BD karena nilai Fhitung > Ftabel, yaitu $154.742 > 2.49$.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi SILPA, DAU dan DAK

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change statistics			Sig. F Change
						F Change	dff	df2	
1	.937 ^a	.878	.872	8.80336E+10	.878	167.422	3	70	.000

- a. Predicators: (constant), SILPA, DAU, DAK
 b. Dependent Variable: Belanja Daerah
 Sumber: Data Olahan SPSS 26, Tahun 2022

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi PAD

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change statistics			Sig. F Change
						F Change	dff	df2	
1	.527 ^a	.278	.269	1.99428E+11	.278	30.415	1	79	.000

- a. Predicators: (constant), PAD
 b. Dependent Variable: Belanja Daerah
 Sumber: Data Olahan SPSS 26, Tahun 2022

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang disajikan pada Tabel 3, hipotesis pertama menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap BD. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung sebesar 2,752, nilai koefisien regresi sebesar 0,898, dan nilai sig sebesar 0,898. 0,008. Artinya x1 berpengaruh signifikan terhadap Y karena nilai sig. < (0,05), yaitu $0,008 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji-t dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap y diterima.

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap BD. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung sebesar 2,219 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,158, sig. 0,030. Artinya DAU berpengaruh terhadap BD karena nilai sig. < (0,05), yaitu $0,030 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji-t, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap BD diterima. Hipotesis ketiga menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap BD. Berdasarkan Tabel diatas, diketahui nilai t sebesar 14.011 dan nilai koefisien regresi sebesar 2.566 dengan nilai sig. 0.000. Hal ini mengatakan

bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap BD karena nilai $sig. < \alpha (0.05)$, yaitu $0.000 < 0.05$. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan DAK berpengaruh signifikan terhadap BD, diterima.

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap BD. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung sebesar 14011, nilai koefisien regresi sebesar 2566, dan nilai sig. 0,000. Artinya DAK berpengaruh signifikan terhadap BD karena nilai sig. $< (0,05)$, yaitu $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji-t, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap BD diterima.

Hipotesis keempat menunjukkan bahwa SILPA berpengaruh signifikan terhadap BD. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai t hitung sebesar 2,380, koefisien regresi sebesar 0,677, dan terdapat sig. 0,020. Artinya SILPA berpengaruh signifikan terhadap BD karena nilai sig. $< (0,05)$, yaitu $0,020 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji-t dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat bahwa SILPA berpengaruh signifikan terhadap BD diterima.

Tabel 6
Perbandingan Uji F (DAU, DAK, dan SILPA) dengan Uji t (PAD) terhadap Belanja Daerah

Variabel	Uji F	Adjusted R Square
DAU	154.742	0.872
DAK		
SILPA		
PAD		0.269

Sumber: Data Olahan SPSS 26, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 6 diketahui nilai F hitung untuk pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen senilai 154.742 dan nilai Ftabel sebesar 2.49. Hal ini berarti variabel independen berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap variabel dependen karena nilai Fhitung $> Ftabel$, yaitu $154.742 > 2.49$.

Berdasarkan Tabel 5 diketahui nilai Adjusted R Square pengaruh SILPA, DAU dan DAK secara simultan terhadap BD senilai 0.872. Maknanya, SILPA, DAU dan DAK berpengaruh secara simultan terhadap BD sebesar 87.20%. Sementara itu, Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui nilai Adjusted R Square pengaruh PAD secara parsial terhadap BD senilai 0.269. Maknanya, PAD berpengaruh secara parsial terhadap BD sebesar 26.90%.

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 6, pengaruh SILPA, DAU dan DAK secara simultan terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD secara parsial terhadap BD, yakni $0.872 > 0.269$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan SILPA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan lebih berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dibandingkan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah secara parsial, diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya fenomena flypaper effect pada DAU, DAK, SILPA, dan PAD terhadap BD Kabupaten kota di Sumatera Barat.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis pertama penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan primer daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diterima oleh Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004) sesuai dengan Peraturan Daerah. Dengan undang-undang no. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan pajak daerah, pajak daerah merupakan kewajiban yang dipungut atas daerah yang terutang oleh orang atau benda

menurut undang-undang, dan tidak serta merta dimajukan dan digunakan untuk kebutuhan masyarakat di daerah provinsi sebesar-besarnya kemakmuran.

Berdasarkan hasil uji t pada penelitian ini diketahui nilai t sebesar 2.752 dan nilai koefisien regresi sebesar 0.898 dengan nilai *sig.* 0.008. Hal ini berarti X1 berpengaruh signifikan terhadap Y karena nilai *sig.* $< \alpha$ (0.05), yaitu $0.008 < 0.05$. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan X1 berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Besaran peningkatan PAD berbanding lurus dengan besaran peningkatan Belanja Daerah, semakin meningkat PAD, maka Belanja Daerah akan semakin mengikat pula.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saifudin, 2018), (Ahmad Solikin, 2016), (Salawali et al., 2019) yang mengatakan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Melalui PAD yang tinggi, maka dari penelitian tersebut disimpulkan pemerintah dapat menurunkan ketergantungannya terhadap dana transfer. Kondisi ini akan menggambarkan kemandirian daerah yang baik, karena pemerintah daerah yang memiliki PAD yang tinggi yang tanpa harus bergantung kepada dana transfer.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis kedua dalam penelitian ini mengatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah. DAU merupakan dana yang berasal dari APBN yang disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. DAU merupakan bagian kecil dari total APBD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila DAU tinggi maka akan memberikan peluang yang besar untuk memenuhi belanja daerah, karena DAU termasuk sumbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang mana merupakan bagian dari belanja daerah.

DAU pada daerah ditentukan dari besar atau kecilnya celah fiskal pada suatu daerah yang hal tersebut merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan potensi daerah, makanya disini kita bisa memanfaatkan DAU sebagai salah satu tolak ukur dalam memenuhi kebutuhan daerah yang bisa digunakan sebagai belanja daerah.

Berdasarkan hasil uji t pada penelitian ini diketahui nilai t sebesar 2.219 dan nilai koefisien regresi sebesar 0.158 dengan nilai *sig.* 0.030. Hal ini berarti DAU berpengaruh terhadap BD karena nilai *sig.* $< \alpha$ (0.05), yaitu $0.030 < 0.05$. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Afriani et al., 2019), (Saifudin, 2018), (Salawali et al., 2019) menyimpulkan bahwa adanya hubungan yang sejalan antara DAU dan belanja daerah, di mana ketika DAU meningkat maka Belanja Daerah juga akan meningkat.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK disalurkan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan, perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan.

Berdasarkan hasil uji t pada penelitian ini diketahui nilai t sebesar 14.011 dan nilai koefisien regresi sebesar 2.566 dengan nilai *sig.* 0.000. Hal ini berarti DAU berpengaruh signifikan terhadap BD karena nilai *sig.* $< \alpha$ (0.05), yaitu $0.000 < 0.05$. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfi Maryati dan Endrawati (2010) yang melakukan penelitian pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitiannya adalah secara simultan DAK berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan dana alokasi khusus dan belanja daerah adalah penelitian (Saifudin, 2018) menjelaskan terdapat pengaruh signifikan antara DAU terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis keempat penelitian ini menunjukkan bahwa sisa pembiayaan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. SILPA adalah selisih antara realisasi pendapatan dan belanja yang dianggarkan untuk suatu periode. SILPA merupakan sumber pendapatan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan sepanjang tahun. Ada dua bentuk penggunaan SILPA, yang pertama untuk melanjutkan kegiatan yang tidak selesai pada tahun sebelumnya, dan yang kedua untuk mendanai kegiatan baru yang tidak memiliki anggaran dalam APBD murni. Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), yaitu penerimaan pembiayaan, digunakan untuk menutup defisit anggaran dimana penerimaan aktual lebih rendah dari pengeluaran aktual, untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tindak lanjut terhadap biaya pengeluaran langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai) dan untuk mendanai utang lain-lain yang terutang sampai dengan akhir tahun buku.

Berdasarkan hasil uji t pada penelitian ini diketahui nilai t sebesar 2.380 dan nilai koefisien regresi sebesar 0.677 dengan nilai *sig.* 0.020. Hal ini berarti SILPA berpengaruh signifikan terhadap BD karena nilai *sig.* $< \alpha$ (0.05), yaitu $0.020 < 0.05$. Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan SILPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil Penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) menguatkan hal tersebut dimana SILPA berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Solikhin, 2016) juga menunjukkan bahwa SiLPA berepengaruh positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh DAU, DAK, SILPA terhadap Belanja Daerah dibandingkan Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah serta Analisis Flypaper Effect

Hasil dari pengujian Hipotesis ke lima yang menunjukkan hasil nilai Fhitung untuk pengaruh x1 sampai x4 Berdasarkan nilai Fhitung untuk pengaruh x1 sampai x4 secara simultan terhadap BD senilai 154.742 dan nilai Ftabel sebesar 2.49. Hal ini berarti x1 sampai x4 berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap BD karena nilai Fhitung $>$ Ftabel, yaitu $154.742 > 2.49$. Berdasarkan Tabel 5 diketahui nilai Adjusted R Square pengaruh SILPA, DAU dan DAK secara simultan terhadap BD senilai 0.872. Maknanya, SILPA, DAU dan DAK berpengaruh secara simultan terhadap BD sebesar 87.20%. Sementara itu, Berdasarkan Tabel 4.15 diketahui nilai Adjusted R Square pengaruh PAD secara parsial terhadap BD senilai 0.269. Maknanya, PAD berpengaruh secara parsial terhadap BD sebesar 26.90%.

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 6, pengaruh SILPA, DAU dan DAK secara simultan terhadap BD lebih besar daripada pengaruh PAD secara parsial terhadap BD, yakni

0.872 > 0.269. Maka dapat di ambil kesimpulan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan SILPA, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan lebih berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dibandingkan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah secara parsial, diterima. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi fenomena flypaper effect pada DAU, DAK, SILPA, dan PAD terhadap Belanja Daerah Kabupaten kota di Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sasana (2010) yang menyatakan bahwa Besaran alokasi Dana Alokasi Umum lebih mendominasi dalam kebijakan Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah. Belanja Daerah lebih merespon Dana Alokasi Umum daripada Belanja Daerah. Selanjutnya dalam penelitian Kusumadewi dan Rahman (2007) menjelaskan pula hasil penelitiannya bahwa DAU berpengaruh lebih signifikan terhadap Belanja Daerah daripada pengaruh PAD.

SIMPULAN KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan terhadap Belanja Daerah. Selain itu, peneliti juga menganalisa fenomena flypaper effect pada DAU, DAK, SILPA dan PAD terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Terjadi fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : Pada penelitian ini tidak digunakan aspek lain sebagai pendukung untuk melihat pengaruh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan Dana Alokasi Umum, pertumbuhan Dana Alokasi Khusus, dan pertumbuhan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap pertumbuhan Belanja Daerah. Penelitian ini hanya menggunakan empat variable independen saja yaitu PAD, DAU, DAK, dan SILPA. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel independen lainnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan peneliti menyarankan : Diharapkan kepada pemerintah daerah agar menggali potensi daerahnya seperti intensifikasi penerimaan pajak daerah dan meminimalisir penggunaan dana perimbangan sehingga terciptanya daerah otonom yang mandiri. Diharapkan penelitian mendatang mampu memperluas jangkauan populasi dan sampel penelitian seperti Kabupaten/Kota se Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi Pertama Salemba empat, Jakarta.

- Afriani, M., Askandar, N. S., & Mahsuni, A. W. (2019). E-JRA Vol. 08 No. 01 Februari 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. *E-Jra*, 08(03), 12–28.
- Afrizawati, 2012. Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota Di Sumatra Selatan. *Journal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi* Vol 2 No 1.
- Ardiansyah dan Widyaningsih. 2014. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Jawa Tengah”. Simposium Nasional Akuntansi 17 Lombok 24-27 September 2014.
- Ardhini. 2011. Pengaruh rasio keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan public dalam prespektif teori keagenan (studi pada kabupaten dan kota di jawa tengah). Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Courant, P.N., Gramlich, E.M., dan D.L. Rubinfeld, (1979), “The Stimulative Effects of Intergovernmental Grants: Or Why Money Sticks Where It Hits”, dalam P.M. Mieszkowski dan W.H. Oakland, (Ed.), *Fiscal Federalism and Grants-in-Aid*, The Urban Institute, Washington, DC: 5-21.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: PT Indeks.
- Halim, A. (2014). *Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inayati, N. . (2017). Fenomena Flypaper Effect, AD, DAU, DAK terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnsl Ekonomi Dan Keuangan*, 1(2), 220–239.
- Iskandar, Irham. 2012. Flypaper Effect pada Unconditional Grants. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Padjajaran. Vol.13 No.1. Hal: 113-131.
- Jensen, M.C Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Junaidi. (2012). Asimetri pada Flypaper Effect: Bukti Empiris Pemanfaatan Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 14(1): 45-55.
- Kuncoro. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan Strategi, dan Peluang*. Erlangga : Jakarta.
- Listiorini. (2012). *Fenomena Fly Paper Effect Pada Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Maimunah. (2006). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupate/Kota di Pulau Sumatra. *Jurnal Ilmiah Padang*. Simposium Nasional Akuntansi IX 11(1): 23-26.
- Mardiasmo. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : CV Andi Offset. Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi ; Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* Vol 5, Des 2010.
- Mianto, A. P. (2007). Pengaruh Flypaper Effect Dau , Pad , Silpa Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Atau Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Mianto, A. P., & Priyadi, M. P. (2019). Pengaruh Plypaper Effect DAU, PAD, SILPA Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Atau Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4).
- Nahlia, F. 2014. “Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2007-2012”. *Jurnal Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)*. Diakses 5 Desember 2014, dari <http://jurnal.umrah.ac.id>.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Rangkang Data.* <http://sumbar.bpk.go.id/rangkang-data/index.html>.
- Prasetya, F. (2013). Modul Ekonomi Publik Bagian VII: Teori Fiskal Federalisme. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* (Vol. 53, Issue 9).
- Saifudin, S. H. (2018). *Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2015-2016 Sri Handayani Saifudin Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM) Diterima : April 2018 . Disetujui : Juli 2018 . 16(4), 79–106.*
- Salawali, W. A., Kindangen, P., & Lopian, A. C. H. (2019). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Pengaruhnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 18(2)*. <https://doi.org/10.35794/jpekd.12790.18.2.2016>
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sasana, H. (2010). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Di Indonesia. *Eko-Regional, 61-66*.
- Sidik, M., B. Raksaka Mahi, R. S., & Negoro., B. B.-. (2002). *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Kompas : Jakarta.
- Sidik et al. 2002. *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Kompas. Jakarta.
- Solikin, A. (2016). Analisis Flypaper Effect pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis 16(1): 11-25*.
- Solikin, Ahmad. (2016). Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 16(1), 11*. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.187>
- Sondang P. Siagian. 2009. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Belanja Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974 Tentang Pendapatan Asli Daerah.*
- V, I. B., Pendapatan, D. A. N., Daerah, A., & Jawa, P. (2012). *Seminar Nasional Kewirausahaan Universitas Tarumanagara , Jakarta Seminar Nasional Kewirausahaan & Inovasi Bisnis V Universitas Tarumanagara , Jakarta*. 410–423.
- Yulina, B., Sari, K. R., Martini, R., Dewi, H. H. S., & Safitri, K. A. (2017). Fenomena Flypaper Effect pada Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 1(2)*, 89–96.
- Yovita, Farah Marta. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010*. Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang.